

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam ekonomi makro dalam pembangunan ekonomi yang secara teori dikatakan sebagai masalah ketimpangan distribusi pendapatan, selain itu kemiskinan juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, pendidikan dan kesehatan yang rendah. Kemiskinan biasanya sering terjadi di negara yang sedang berkembang seperti negara Indonesia ini. Bagi negara Indonesia, kemiskinan merupakan salah satu masalah besar di dalam perekonomian yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan oleh pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah. Pemerintah sudah mencoba berbagai macam cara guna mengurangi kemiskinan di suatu daerah tetapi dengan jumlah penduduk yang terus menerus bertambah maka dibutuhkan solusi yang baru guna menghadapi tantangan.

Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ialah Provinsi Jawa Barat. Provinsi ini memiliki jumlah penduduk mencapai 49,94 juta penduduk (BPS, 2020) dan terus menerus bertambah setiap tahunnya. Guna mencapai kesamarataan antar daerah pemerintah pusat membuat kebijakan desentralisasi guna mengurangi kemiskinan. Dengan adanya kebijakan baru dari pusat mengenai desentralisasi maka otoritas daerah seperti Gubernur Jawa barat bisa menentukan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

karena kondisi perekonomian setiap daerah yang berbeda yang membuat kebijakan desentralisasi ini bisa optimal.

Dalam kebijakan desentralisasi pemerintahan Jawa Barat membuat beberapa strategi optimal guna mengurangi tingkat kemiskinan di daerah ini seperti level miskin ekstrim diberi daya hidup dengan bantuan keuangan dan bantuan sosial, level miskin tengah dengan agresivitas pembukaan lapangan kerja via investasi dan penguatan UMKM dan yang terakhir level miskin atas dilatih wirausaha dan diberi modal usaha (Ridwan Kamil melalui Peraturan Gubernur, 2021). Dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di daerah ini.

Mengacu pada definisi kemiskinan, menurut Amalia (2014) besarnya kemiskinan sebenarnya dapat diukur dengan tanpa mengacu pada garis kemiskinan (*poverline*). Mengikuti hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan ekonomi jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang sehingga kemiskinan cenderung bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Kemiskinan yang bersifat fluktuatif disebabkan perubahan pada garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, yang secara umum didasarkan oleh harga kebutuhan bahan pokok dan pengeluaran atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk. Dengan sifat kemiskinan yang fluktuatif maka bisa dijadikan pedoman acuan kebijakan untuk dipilih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut ialah data kemiskinan di Provinsi Jawa Barat,



Sumber data: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Gambar 1.1 Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2022

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa nilai kemiskinan dari Provinsi Jawa Barat tingkat persentase kemiskinan sempat turun drastis pada tahun 2019 mencapai 6,91%. Hal ini menandakan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini. Hal ini tidak berlangsung lama karena perekonomian di Jawa Barat sempat memburuk pada saat pandemi covid-19 yang membuat persentase penduduk miskin di Jawa Barat naik kembali menuju angka 8,40% pada tahun 2021 dan sudah menurun kembali ke angka 8,06% pada tahun 2022 dengan kebijakan baru yang diciptakan oleh Pemprov Jawa Barat. Hasil ini yang membuat kemiskinan di Jawa Barat berhasil menempati peringkat ke-15 secara nasional (BPS, 2022).



Sumber data: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Gambar 1.3 Angka Ketergantungan di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-2022

Berdasarkan dari grafik diatas mengenai angka ketergantungan dapat dilihat bahwa tahun 2017 angka ketergantungan mencapai 47% yang berarti dari total 100 orang usia produktif terdapat sekitar 47 orang dengan usia non produktif. Sedangkan angka tersebut menurun drastis pada tahun 2022 yang angka ketergantungan hanya sekitar 42 % yang berarti dari total 100 orang usia produktif terdapat sekitar 42 orang usia yang non produktif. Hasil penelitian ini sesuai peneltian sebelumnya oleh Qulub (2023) yang menyatakan bahwa rasio angka ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Rasio angka ketergantungan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang produktif harus menanggulangi usia yang non produktif. Angka ketergantungan yang tinggi atau rendah bisa dijadikan pedoman bagaimana perekonomian pada suatu daerah

tersebut berjalan dengan baik atau tidak begitu pula dengan adanya indeks pengeluaran.

Indeks pengeluaran menunjukkan seberapa besar pengeluaran pemerintah khususnya di wilayah Jawa Barat. Semakin tinggi nya indeks pengeluaran maka bisa dilihat bahwa perekonomian tersebut berjalan dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Indeks pengeluaran juga bisa menjadi salah satu faktor utama untuk melihat apakah perekonomian di suatu daerah itu berkembang atau tidak karena bisa menjadi pedoman kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berikut merupakan data indeks pengeluaran di Provinsi Jawa Barat,



Sumber data: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Gambar 1.4 Indeks pengeluaran di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2017-
2022

Bisa dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah terus bertambah hingga 73% pada tahun 2022 untuk menanggulangi permasalahan yang sedang terjadi di wilayah Jawa Barat. Hal ini juga termasuk dalam

menanggulangi tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Diharapkan dengan meningkatnya tingkat pengeluaran pemerintah dapat mengurangi kemiskinan yang sedang terjadi di wilayah Jawa Barat ini.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah harus dilihat dari ketepatan sasaran dalam pengeluaran seperti bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang membutuhkan atau bantuan pembuatan IKM-IKM untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan yang saat ini masih banyak dialami oleh warga Jawa Barat diduga oleh adanya tingkat ketergantungan dan juga pengeluaran masyarakat yang masih cenderung tinggi. Walaupun dengan meningkatnya indeks pengeluaran dari tahun ke tahun semakin tinggi yang berarti perekonomian di daerah Jawa Barat terus berkembang, akan tetapi hal ini juga bisa berakibatkan buruk jika tidak diikuti oleh faktor lain seperti pengawasan dan penargetan yang sesuai dengan kebijakan yang dibuat atau ini akan menjadi boomerang dan akan mengakibatkan kemiskinan yang bertambah lagi di kemudian hari. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang pengaruh angka ketergantungan dan indeks pengeluaran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mencoba menganalisis :

1. Bagaimana pengaruh angka ketergantungan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh indeks pengeluaran terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh angka ketergantungan terhadap kemiskinan Kabupaten/kota di Jawa Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks pengeluaran terhadap kemiskinan Kabupaten/kota di Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

1. Bagi Pemerintah

Lembaga pemerintahan diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pembandingan kinerja pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan terkait pengaruh Angka ketergantungan, Indeks pengeluaran terhadap Kemiskinan

2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literasi bagi mahasiswa terkait pengaruh angka ketergantungan, indeks pengeluaran terhadap kemiskinan